

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak kemenangan Partai Komunis Cina (PKC) dan berdirinya Republik Rakyat Cina (Cina) pada tahun 1949, Cina secara resmi menggunakan ideologi sosialis-komunis dan Partai Komunis Cina sebagai pemegang tunggal otoritas kekuasaan. Sebagai sebuah negara sosialis-komunis, Cina menggunakan ideologi komunisme yang dibuat oleh Marx dan Lenin. Dalam “Manifesto Komunis”, dikemukakan bahwa hukum dasar dari perkembangan semua masyarakat yang antagonistik adalah hukum perjuangan kelas, perjuangan antara kelas yang menghisap dengan yang dihisap, antara kelas yang berkuasa dengan kelas yang ditindas. Dengan adanya perjuangan kelas, maka masyarakat akan berkembang ke tingkat-tingkat yang lebih tinggi sampai pada masyarakat sosialis, dimana saat itu kapitalis akan hancur dan proletar akan menang. Selain itu diungkapkan pula peranan partai komunis yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kelas buruh dan merupakan barisan pelopor (*vanguard party*) dari kelas pekerja.¹

Dalam pendapat para pemikir dan sejarawan RRC, sebelum kemenangan PKC, masyarakat Cina yang mayoritas adalah petani miskin berada dalam penindasan para tuan tanah, *warlord* dan kapitalis. Maka sesuai dengan situasi Cina saat itu menurut persepsi para pemimpin komunis di Cina, kelas yang ditindas adalah para petani dan rakyat miskin. Dalam Marxisme-Leninisme, yang menjadi basis revolusi adalah kaum pekerja. Namun, oleh Mao Zedong, pemimpin generasi pertama Cina, teori ini kemudian disinifikasikan sesuai dengan kondisi Cina, dan yang kemudian menjadi basis revolusi adalah kaum petani, mayoritas rakyat Cina.

Sebagai sebuah negara komunis, tugas Cina sejak masa lalu sampai sekarang adalah menentang kapitalisme karena para kapitalis dianggap menindas kaum proletar. Pada masa awal berdirinya Republik Rakyat Cina sekitar tahun 1951, pemerintah mulai melancarkan serangkaian gerakan yang diarahkan untuk

¹ S.Suroso, *Asal Usul Teori Sosialisme, Marxisme sampai Komune Paris* (Jakarta : Pustaka Pena, 2001) hal 44

membasmi para kapitalis, seperti kampanye tiga anti² dan kampanye lima anti³ yang ditujukan kepada kalangan industri dan perdagangan. Pada masa ini tepatnya pada era Mao Zedong, kalangan pengusaha swasta pada akhirnya menerima perlakuan yang kurang baik dari pemerintah Cina. Seluruh pedagang, bankir, dan industrialis harus melakukan pengakuan diri, kritik terhadap orang lain dan diri sendiri atas kejahatan yang mereka lakukan. Disusul kemudian dengan disitanya aset milik para “komprador borjuis”⁴, perusahaan-perusahaan besar dijadikan perusahaan milik Negara, semuanya disita oleh pemerintah. Ketika pada tahun 1956, pemerintah menyatakan “transformasi sosialis” telah tercapai, kelas kapitalis benar-benar telah dikikis. Di masa Mao ini, yang menjadi fokus pemerintah adalah kaum buruh dan petani, sedangkan kaum pedagang di cap buruk.

Pada perkembangannya kemudian, yaitu sejak masa Deng Xiaoping sampai sekarang keberadaan pengusaha swasta dan usahanya akhirnya diperbolehkan kembali dan bahkan kini menjadi salah satu pendorong keberhasilan ekonomi Cina. Di mulai sejak masa reformasi tahun 1978, sektor swasta telah bertumbuh sebesar 20 persen tiap tahun, jauh di atas pertumbuhan ekonomi rata-rata periode yang sama sebesar 8 persen dan telah memberikan pendapatan yang besar bagi negara terutama dalam hal pajak dan mempekerjakan jutaan rakyat. Bahkan sektor non-negara kini membukukan dua pertiga dari total produktivitas dan GDP.⁵

Dari hal ini, kita bisa melihat sebuah kenyataan baru bahwa kini Republik Rakyat Cina sebuah negara sosialis-komunis besar telah mulai mengubah arah ideologinya ke orientasi pasar. Hal ini tentu saja menjadi sebuah hal yang berlawanan dengan ajaran Marxisme-Leninisme dan Pemikiran Mao. Pada satu

² 三反运动 *san fan yundong*: Kampanye tiga anti, adalah sebuah gerakan yang dilaksanakan pada tahun 1951-1952, melawan korupsi, birokrasi dan pemborosan dalam partai, pemerintah, tentara dan organisasi massa)

³ 五反运动 *wu fan yundong*: Kampanye lima anti, adalah sebuah gerakan yang dimulai sejak tahun 1952, melawan penyuapan, penggelapan pajak, pencurian property negara, kecurangan dalam kontrak pemerintah dan pencurian informasi ekonomi, seperti yang biasa dilakukan oleh pemilik perusahaan atau industri swasta.

⁴ Istilah yang dipakai untuk menyebut para kapitalis pada awal berdirinya Republik Rakyat Cina.

⁵ Welborn, John W., “Back-Alley Banking: Private Entrepreneurs in China” dalam *The Cato Journal* (September 22, 2002) <http://www.articlearchives.com/economy-economic-indicators/economic-indicators-gross/1257077-1.html>

sisi, Cina merupakan negara sosialis-komunis yang menggunakan prinsip kepemilikan bersama dan menentang adanya kepemilikan pribadi atau swasta yang dinilai merupakan bibit-bibit kapitalis. Namun di sisi lain tidak bisa dipungkiri bahwa kini Cina mengalami dilema dalam memenuhi perkembangan dunia yang semakin terbuka, dan mau tidak mau pemerintah (dalam hal ini Partai Komunis Cina sebagai pemerintah) perlahan-lahan bergeser menuju orientasi pasar melalui serangkaian “kompromi” kebijakannya dan perkembangan dalam arah ideologinya.

Perubahan ini dapat dilihat dari serangkaian perkembangan teori yang digunakan PKC sebagai pedoman mereka. Bagi PKC, Marxisme-Leninisme merupakan sebuah bentuk ideologi murni, yang menjadi landasan. Dari ideologi murni tersebut, muncul dan berkembang juga ideologi praktis yaitu Pemikiran Mao (毛思想), Teori Deng Xiaoping (邓小平理论) dan Teori “Tiga Perwakilan” (三个代表重要思想) oleh Jiang Zemin. Muncul dan berkembangnya ideologi praktis ini menurut PKC adalah sebagai bentuk sinifikasi atau penyesuaian terhadap situasi-kondisi dalam dan luar negeri Cina yang berprinsip pada melihat pada realitas (实事求是) dan pembebasan pemikiran (解放思想).

Kompromi pertama PKC terhadap ideologi sosialis-komunis, sudah mulai dilakukan pada akhir tahun 1970. Proses itu ditandai dengan diberlakukannya kebijakan reformasi dan keterbukaan oleh Deng Xiaoping, yang membuka Cina pada pasar dunia. Melalui pernyataan PKC dalam Kongres PKC ke-11 tahun 1987, bahwa saat itu Cina masih berada dalam sosialisme tahap awal, maka peran “pasar” mulai diaktifkan kembali dan diperlukan sebagai alat ekonomi dengan tetap mengutamakan pada perencanaan pusat dan kepemilikan publik. Berdasarkan sumber-sumber Cina, setelah pencaangan reformasi dan keterbukaan serta rumusan sosialisme tahap awal maka pada era-era selanjutnya, kebijakan ini kemudian memberi ruang bagi berkembangnya kembali kaum pengusaha swasta yang dahulunya adalah kelompok yang selalu dicurigai dan dilarang pada masa Mao dan juga masuknya investasi asing ke Cina. Perkembangan situasi ekonomi Cina sampai pada tahun 2000, akhirnya kemudian

menghasilkan sebuah kompromi kebijakan baru yaitu dengan memperbolehkan masuknya pengusaha swasta ke dalam anggota partai.

Untuk lebih dari 25 tahun periode transisi yang panjang dari ekonomi terencana dan terpusat menuju ke sebuah ekonomi berorientasi pasar, sejumlah pengusaha swasta dan perusahaan swasta telah meningkat dan kini memainkan peranan yang penting dalam perkembangan ekonomi Cina.⁶ Salah satu hasil kongres PKC ke-16 pada November 2002 adalah keputusan untuk memasukkan ajaran tentang “Tiga Perwakilan” ke dalam anggaran dasar partai. Dalam teori ini, dikatakan bahwa Partai Komunis Cina tidak hanya menjadi wakil kelas proletar, tetapi juga “tuntutan perkembangan kekuatan industri yang paling maju” (中国先·生·力的·展要求) yaitu kelas pengusaha swasta.

Menurut Jiang, melalui pengamatan bahwa antara tahun 1989 sampai 2001, jumlah perusahaan swasta meningkat dibandingkan jumlah perusahaan negara yang cenderung menurun akibat privatisasi, maka kehadiran perusahaan-perusahaan swasta akhirnya mampu menyerap para pengangguran yang ada sehingga mampu menjaga kestabilan ekonomi dan sosial masyarakat. Kini, pengusaha swasta dianggap sebagai kelas kapitalis baru di Cina yang adalah "orang-orang yang membangun" sosialisme dengan karakteristik Cina" (中国特色社会主义) dan berperan sejajar dengan para buruh dan petani. Oleh karenanya, partai harus menghormati dan melindungi elemen dan usaha kaum pengusaha swasta, yang juga telah berperan positif dalam perkembangan rakyat.

Oleh karena itu, pemikiran "Tiga Perwakilan", menurut Jiang Zemin dan sebagian anggota partai sebenarnya merupakan refleksi dari suatu keadaan yang mengharuskan terjadinya perubahan kebijakan partai. Jiang Zemin menyebutkan bahwa pemikiran "Tiga Perwakilan" adalah kelanjutan dan perkembangan alamiah dari Marxisme-Leninisme, Pemikiran Mao Zedong, dan Teori Deng Xiaoping sebagai petunjuk baru bagi partai untuk bekerja.

⁶ Toshiki Kanamori and Zhao Zhijun, *Private sector development in People's Republic of China* (Tokyo: ADB Institute, 2005), hal 1

Melalui keseluruhan proses tersebut pula, yaitu sejak tahun 1949 sampai pada tahun 2002 saat disahkannya Teori “Tiga Perwakilan” dapat terlihat adanya perkembangan pemikiran dan teori dasar PKC.

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasar pada latar belakang yang telah disampaikan di atas dibuat sebelumnya, penulis menetapkan pembatasan mengenai masalah yang akan dibahas dan atas dasar itu skripsi ini difokuskan pada masalah-masalah bagaimana proses munculnya Teori “Tiga Perwakilan” di dalam Cina yang masih berpegang pada ideologi Marxisme-Leninis, apa saja faktor-faktor yang mendorong munculnya Teori “Tiga Perwakilan” ini, serta apa makna yang terkandung di dalam teori ini.

1.3 Tujuan penulisan

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui proses munculnya Teori “Tiga perwakilan” di Cina yang masih memegang ideologi Marxisme-Leninisme serta dipimpin oleh PKC, untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong munculnya Teori “Tiga Perwakilan” ini, tujuan diciptakannya teori ini bagi masyarakat Cina dan makna yang terkandung dalam teori ini.

1.4 Metode Penulisan dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian sejarah, sehingga metode penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini meliputi tahap-tahap heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi, yang bersifat deskriptif-analitis.

Teknik pengumpulan data yang diterapkan pada karya tulis ilmiah ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini memakai dua sumber kepustakaan, yaitu primer dan sekunder. Sumber primer adalah sumber-sumber yang dibuat oleh pemerintah Cina sendiri, berupa buku, artikel dan website. Sedangkan sumber sekunder adalah sumber-sumber yang berasal dari luar barat, seperti dari tinjauan, laporan, buku dan artikel yang dibuat oleh ahli-ahli barat dan juga orang Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Bersangkutan dengan sistematika penulisan, penelitian ini disusun dengan cara membagi dalam empat bab, yang mana tiap bab terdapat beberapa sub bab dengan pokok-pokok pembahasan utama yang terkandung dalam bab. Berikut akan diuraikan secara rinci dari keseluruhan karya tulis ilmiah ini. Adapun susunannya adalah sebagai berikut:

Bab satu merupakan bab pendahuluan dalam skripsi ini. Dalam bab ini, berisi penguraian mengenai latar belakang penulisan di mana berkaitan dengan alasan mengapa penulis mengambil topik dalam penulisan skripsi ini, pokok permasalahan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang hendak dikaji lebih dalam pada penulisan skripsi ini, tujuan penulisan yang merupakan hal-hal yang hendak diketahui dan dipahami seputar analisis permasalahan yang ada di dalam topik penulisan skripsi ini. Pada sub bab metode penulisan data, dijabarkan mengenai metode pengumpulan data-data yang dipakai serta teknik yang dipakai dalam penulisan skripsi ini. Sub bab terakhir adalah sistematika penulisan skripsi yang menguraikan susunan bab dan sub bab dalam skripsi ini.

Bab dua merupakan bab yang menguraikan mengenai ideologi dan perkembangan ekonomi. Bab ini akan dimulai dengan penguraian mengenai sejarah masuknya paham Marxisme-Leninisme ke Cina dan ajaran-ajaran umum Marxisme-Leninisme. Pada bab ini pula, penulis akan menguraikan mengenai pemikiran Mao Zedong sebagai bentuk sinifikasi Marxisme pertama di Cina, dan proses Marxisme-Leninisme menjadi fondasi Partai Komunis Cina. Bab ini akan diakhiri dengan pemaparan mengenai Sosialisme berkarakteristik Cina, sebagai penggambaran umum mengenai perkembangan ideologi Marxisme-Leninisme di Cina dan beberapa kompromi yang telah dilakukan oleh PKC pada masa kepemimpinan sebelum Jiang Zemin.

Dalam bab tiga akan menuliskan rangkaian secara umum mengenai proses munculnya Teori “Tiga perwakilan” di Cina, yang secara sah masih mengakui ideologi Marxisme-Leninisme dan kepemimpinan PKC, juga mengenai faktor-faktor yang mendorong munculnya Teori “Tiga Perwakilan” ini serta hal-hal seputar teori ini.

Skripsi ini akan diakhiri dalam bab empat. Pada bab empat akan diuraikan kesimpulan atas pembahasan dan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Pada simpulan ini, akan diuraikan secara lebih singkat hasil pembahasan atas pokok permasalahan yang telah disampaikan penulis.

